

GREEN ACCOUNTING IN PAPER REVIEW

Tiffany Citrayantie¹, Darwis Said², Mediaty³

^{1,2,&3} Universitas Hasanuddin

Email: tiffany.nyrusman@gmail.com^{1*}, darwissaid@yahoo.com², unhasmediaty@gmail.com³

ABSTRACT

To avoid overexploitation of nature in meeting the needs of human life, a country through its government issued rules related to the "rules of the game" for companies to use natural resources. The research objective is to find out how the implementation of green accounting in indonesia and in several other countries?; to find out how green accounting relates to company performance? This research is a library research, with library research methods from primary and secondary data sources. The conclusion is that many countries have implemented green accounting and incorporated it into government regulations; maybe for indonesia, it still feels a little difficult to implement green accounting, but to get there, it is very possible that the indonesian institute of accountants (iai) continues to strive and update the guidelines related to green accounting; companies that implement green accounting will give positive results related to the company's environmental performance; at present, companies that have positive environmental performance, get higher trust from the community.

Keywords: *Environmental Performance, Green Accounting, Sustainable.*

GREEN ACCOUNTING DALAM PENELITIAN KEPUSTAKAAN

ABSTRAK

Untuk menghindari eksploitasi berlebihan kepada alam dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, suatu negara melalui pemerintahannya mengeluarkan aturan terkait “aturan main” bagi perusahaan dalam memanfaatkan sumber dari alam. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Green Accounting di Indonesia dan di beberapa negara lain?; untuk mengetahui bagaimana hubungan Green Accounting dengan kinerja perusahaan? Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan metode riset pustaka dari sumber data primer dan sekunder. Simpulannya adalah telah banyak Negara yang menerapkan Green Accounting dan menuangkannya ke dalam peraturan-peraturan pemerintahan; mungkin untuk di Indonesia masih terasa sedikit sulit untuk menerapkan Green Accounting, namun untuk menuju ke sana, sangat memungkinkan dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terus berupaya dan memperbaharui pedoman terkait Green Accounting; perusahaan yang menerapkan Green Accounting akan memberikan hasil yang positif terkait kinerja lingkungan perusahaan tersebut; pada masa kini, perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang positif, mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat.

Kata Kunci : Akuntansi Lingkungan, Keberlanjutan, Kinerja Lingkungan

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang paling bergantung dengan alamnya. Tuhan menciptakan alam dengan segala kesempurnaannya, dan manusia bergantung kepada alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kebutuhan tersebut (baik sandang, pangan dan papan) menjadi alasan manusia untuk memanfaatkan alam yang ada, sumber yang ada, walau sering manusia memanfaatkannya terlalu berlebihan tanpa memikirkan keberlanjutan alam ini.

Manusia kemudian membuat perusahaan-perusahaan agar mampu memanfaatkan alam (sumber yang ada) dan menghasilkan keluaran yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat luas. Tetapi, terkadang perusahaan-perusahaan ini lupa bahwa alam ini tetap harus dijaga keberlanjutannya demi anak cucu kita nanti. Karena generasi-generasi berikutnya juga membutuhkan alam ini sama seperti generasi kita pada saat ini.

Kemudian ada timbul pertanyaan, apakah manusia sangat bergantung dengan alam? Dan bagaimana dengan alam, apakah juga sangat bergantung dengan manusia? Jelas bahwa manusia sangat bergantung dengan alam, karena dapat dikatakan bahwa hampir semua kebutuhan manusia pada saat ini membutuhkan sumber dari alam. Lalu bagaimana dengan pertanyaan berikutnya: apakah alam juga bergantung dengan manusia? Maka peneliti dapat mengatakan bahwa alam tidak membutuhkan manusia, karena walau tanpa campur tangan manusia, alam tetap dapat “berjalan” dengan caranya sendiri, sesuai dengan tujuan penciptaannya.

Dari jawaban di atas, dapat kita katakan bahwa manusia yang sangat membutuhkan alam, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, menjaga keberlangsungan alam sangatlah penting, karena dengan menjaga keberlangsungan alam adalah sama dengan menjaga keberlangsungan manusia itu sendiri.

Dari sana, mulai muncul berbagai pemikiran terkait kepedulian dalam menjaga keberlanjutan hidup alam ini. Dengan tujuan agar generasi-generasi berikutnya dapat juga memanfaatkan hasil dari alam (sumber yang ada), serta tetap menjaga alam yang sudah diciptakan Tuhan.

Pemikiran-pemikiran tersebut mulai berkembang di beberapa negara, dengan membuat beberapa peraturan terkait pemanfaatan sumber dari alam oleh perusahaan. Suatu negara memang harus turut campur tangan dalam menjaga alam dan kelestariannya dari pemanfaatan oleh manusia (melalui perusahaan-perusahaan yang ada) agar tidak berlebihan dan akhirnya akan merusak alam itu sendiri.

Kemudian timbul lagi pertanyaan, mengapa suatu negara (melalui pemerintahannya) hanya mengeluarkan aturan-aturan terkait pemanfaatan sumber dari alam di negaranya, bukannya melarangnya (perusahaan dalam memanfaatkan sumber dari alam)? Dikarenakan kehidupan manusia pada masa kini, sangat bergantung dengan alam (dalam memanfaatkan sumber dari alam yang ada) untuk menghasilkan berbagai produk yang digunakan oleh manusia. Oleh karena itu, untuk menghindari eksploitasi berlebihan kepada alam dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, suatu negara melalui pemerintahannya mengeluarkan aturan terkait “aturan main” bagi perusahaan dalam memanfaatkan sumber dari alam.

Untuk perusahaan, dengan adanya “aturan main” tersebut dan komitmen perusahaan dalam menjalankan “aturan main” tersebut, serta kepedulian perusahaan akan pentingnya keberlanjutan alam (atau lingkungan), diharapkan keberlanjutan alam dapat terjaga sehingga keberlanjutan perusahaan juga terjamin.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara perusahaan menunjukkan kepedulian perusahaan terkait alam (lingkungan) dan komitmen perusahaan dalam menjalankan “aturan main”-nya? Jawabannya adalah melalui sistem akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Sistem akuntansi yang dimaksud adalah Green Accounting.

Green Accounting memang bukan hal yang baru dalam sistem akuntansi perusahaan di dunia, tetapi penerapannya dalam perusahaan dan hubungannya dengan kinerja perusahaan itu yang masih menjadi pertanyaan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut: bagaimana implementasi Green Accounting di Indonesia dan di beberapa negara lain?; dan bagaimana hubungan Green Accounting dengan kinerja perusahaan?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana implementasi Green Accounting di Indonesia dan di beberapa negara lain?; untuk mengetahui bagaimana hubungan Green Accounting dengan kinerja perusahaan?

TINJAUAN PUSTAKA

Kusumaningtiyas (2013:138) menyatakan bahwa konsep *green (environmental) accounting*, akuntansi lingkungan sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa. Akibat tekanan lembaga-lembaga bukan pemerintah dan meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat yang mendesak agar perusahaan-perusahaan bukan sekedar berkegiatan industri demi bisnis saja, tetapi juga menerapkan pengelolaan lingkungan.

Menurut Cohen dan Robbins (dalam Ningsih & Rachmawati, 2017:151) *Green accounting* atau *environmental accounting* didefinisikan sebagai: “a style of accounting that includes the indirect costs and benefits of economic activity-such as environmental effects and health consequences of business decisions and plans”, bahwa artinya adalah akuntansi lingkungan merupakan jenis akuntansi yang memasukkan biaya dan manfaat tidak langsung dari aktivitas ekonomi, seperti dampak lingkungan dan konsekuensi kesehatan dari perencanaan dan keputusan bisnis.

Sedangkan menurut Bell dan Lehman (*dalam* Kusumaningtias, 2013:138) mendefinisikan akuntansi lingkungan sebagai: “*Green accounting is one of the contemporary concepts in accounting that support the green movement in the company or organization by recognizing, quantifying, measuring and disclosing the contribution of the environment to the business process*”.

Untuk mengatasi permasalahan krisis ekologi dan krisis sosial yang kian serius, dalam KTT Rio+20 di Rio de Janeiro pada 20-22 Juni 2012, yaitu KTT Bumi yang diselenggarakan dalam rangka peringatan 20 tahun KTT Bumi Juni 1992, para pemimpin dunia via dokumen “*The Future We Want*” menyepakati penerapan konsep “*Green Economy* atau Ekonomi Hijau” sebagai paradigma baru dalam pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan (ekologi). Tujuannya adalah untuk mewujudkan visi Pembangunan Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan (Lako, 2018).

Maka, dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa *Green Accounting* adalah sistem akuntansi yang digunakan perusahaan dimana perusahaan tersebut memasukkan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait keberlanjutan alam (lingkungan). Serta bagaimana perlakuan akuntansi atas biaya-biaya yang terkait dengan biaya lingkungan tersebut, dan menganalisisnya apakah berdampak baik atau buruk terhadap perusahaan.

Ada beberapa teori yang terkait dengan *Green Accounting*, yaitu *Legitimacy Theory* dan *Stakeholder Theory*. Pengertian *Legitimacy Theory* menurut Amri (2015) bahwa legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan.

Adapun menurut Lindblom (1994:2), legitimasi adalah suatu kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai entitas adalah kongruen dengan sistem nilai sistem sosial yang lebih besar di mana entitas merupakan bagian. Ketika perbedaan, aktual atau potensial, ada di antara dua sistem nilai, ada ancaman terhadap legitimasi entitas.

Sedangkan, menurut Deegan, Robin dan Tobin (2002:318) mengatakan bahwa teori legitimasi adalah teori yang (sebagaimana diterapkan dalam literatur pelaporan sosial dan lingkungan) agak sederhana tetapi tetap menjadi dasar teoritis yang paling sering digunakan dalam upaya menjelaskan kebijakan pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. Teori legitimasi bergantung pada gagasan tentang kontrak sosial dan pada asumsi yang dipertahankan bahwa manajer akan mengadopsi strategi, termasuk strategi pengungkapan, yang menunjukkan kepada masyarakat bahwa organisasi berusaha memenuhi harapan masyarakat (sebagaimana dimasukkan dalam kontrak sosial). Sesuai dengan teori legitimasi, pilihan manajer untuk strategi melegitimasi didasarkan pada persepsi manajer tertentu yang terlibat, dan manajer yang berbeda akan cenderung memiliki ide yang berbeda tentang apa yang diharapkan masyarakat (yaitu, apa ketentuan kontrak sosial), dan apakah organisasi dianggap oleh anggota masyarakat sesuai dengan harapan ini. Namun, ketika peristiwa signifikan seperti bencana lingkungan besar terjadi, atau ketika ada minat media massa yang berkelanjutan, maka masuk akal untuk mengasumsikan bahwa sebagian besar manajer akan menganggap bahwa legitimasi berkelanjutan organisasi terancam. Dapat dibayangkan, akan ada juga pandangan yang berbeda tentang strategi yang tepat untuk diadopsi ketika legitimasi terancam.

Teori berikutnya adalah *Stakeholder Theory*. Menurut Thomas dan Andrew (*dalam* Efriyanti, Genevieve, & Riswan, 2012:272), *Stakeholders Theory* memiliki beberapa asumsi sebagai berikut: 1).Perusahaan memiliki hubungan dengan banyak kelompok stakeholders yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan perusahaan; 2).Teori ini ditekankan pada sifat alami hubungan dalam proses dan keluaran bagi perusahaan dan stakeholdersnya; 3).Kepentingan seluruh legitimasi stakeholders memiliki nilai secara hakiki, dan tidak membentuk kepentingan yang didominasi satu sama lain; 4).Teori ini memfokuskan pada pengambilan keputusan manajerial.

Pada masa kini, sudah banyak negara yang mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk menerapkan *Green Accounting* dalam sistem akuntansi perusahaannya. Dikarenakan bukti nyata bahwa memang perusahaan-perusahaan memberikan kontribusi kepada perekonomian suatu negara tetapi dibalik itu semua, perusahaan-perusahaan jugalah yang memberikan kontribusi terbesar dalam kerusakan alam (lingkungan).

Memanfaatkan alam bukanlah hal yang salah, tetapi memanfaatkannya dengan cara yang berlebihan, itulah yang salah. Untuk membuat suatu perusahaan paham dan berkomitmen dalam menjaga keberlanjutan alam merupakan hal yang sedikit berliku, dikarenakan paradigma lama perusahaan yang hanya berfokus “mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin”.

Tetapi dengan adanya peraturan-peraturan baik internasional ataupun nasional di suatu negara, diharapkan dapat membuat perusahaan berkomitmen menjaga keberlanjutan alam, walau mungkin awalnya merupakan suatu “keterpaksaan”.

Walaupun peraturan-peraturan terkait *Green Accounting* sudah banyak, penerapan di setiap negara akan berbeda dengan negara lainnya, dikarenakan pengertian dari *Green Accounting* itu sendiri dalam peraturan negaranya juga berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.

Menjadi pertanyaan kemudian adalah apa yang di “dapat” oleh perusahaan dengan menerapkan *Green Accounting* terkait kinerja perusahaan (untuk di semua negara pada umumnya)?

Gallhofer dan Jim (1997) menyatakan bahwa perusahaan dapat menerapkan *Green Accounting* secara sukarela, mengungkapkan yang terkait dengan lingkungan secara sukarela, jika manajemen konsisten untuk melakukannya, walaupun bagi perusahaan, tujuan yang mereka ingin capai adalah memaksimalkan kekayaan bisnis ataupun setidaknya bertahan secara finansial (keberlanjutan perusahaan). Namun, *Green Accounting* penting untuk tetap dilakukan perusahaan karena saat ini pelanggan menuntut perusahaan untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan.

Menurut Alexopoulos, Kounetas, & Tzelepis (2012) temuan empiris mengungkapkan bahwa peningkatan kinerja lingkungan merupakan sumber potensial keunggulan kompetitif yang mengarah pada proses yang lebih efisien, peningkatan produktivitas, biaya kepatuhan yang lebih rendah, dan peluang pasar baru. Dengan demikian, menerapkan akuntansi lingkungan di dalam sistem akuntansi perusahaan merupakan hal yang penting.

Menurut Suratno (2006) kinerja lingkungan perusahaan merupakan kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Kinerja lingkungan perusahaan berfokus pada kegiatan perusahaan dalam melestarikan lingkungan dan mengurangi dampak negatif lingkungan yang timbul akibat aktivitas perusahaan. Program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau sering disebut proper dapat dijadikan pilihan dalam mengukur kinerja lingkungan perusahaan yang ada di Indonesia. PROPER merupakan program pemeringkat lingkungan dari kementerian Lingkungan Hidup. Penggunaan warna di dalam penilaian proper merupakan bentuk komunikatif penyampaian kinerja kepada masyarakat, mulai dari yang terbaik, emas, hijau, biru, merah sampai yang terburuk, hitam. Secara sederhana masyarakat dapat mengetahui tingkat penataan pengelolaan lingkungan pada perusahaan dengan melihat peringkat warna yang ada.

Aspek penilaian PROPER adalah ketaatan terhadap peraturan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengendalian limbah B3, AMDAL, serta pengendalian pencemaran laut. Ketentuan ini bersifat wajib untuk dipenuhi. Jika perusahaan memenuhi seluruh peraturan tersebut maka akan diperoleh peringkat BIRU, jika tidak maka akan memperoleh peringkat MERAH atau HITAM, tergantung pada aspek ketidak-taatannya. Berdasarkan peraturan Nomor 6 tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusahaan yang berperingkat hitam langsung diarahkan kepada proses penegak hukum sedangkan perusahaan yang berperingkat merah akan dimasukkan dalam pembinaan untuk perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan (Ningsih & Rachmawati, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dimana peneliti menggunakan metode riset pustaka. Perbedaan utama antara riset pustaka dan riset lapangan terletak pada tujuan, fungsi dan / atau kedudukan studi pustaka dalam masing-masing penelitian itu. Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi seperti : sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian dan/atau proposal guna memperoleh informasi penelitian sejenis; memperdalam kajian teoritis; atau mempertajam metodologi. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Zed, 2004).

Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung, sehingga mereka dapat dijadikan saksi. Apabila di dalam tulisan tersebut penulis menyelipkan sedikit atau sebagian besar mengenai hasil-hasil penelitian yang ia lakukan sendiri, maka porsi atau bagian yang menceritakan pengalaman dan hasil penelitian itu tetap disebut sebagai sumber primer (Hardani, dkk, 2020).

Sedangkan, dalam arti bahwa sumber data sekunder merupakan data sumber yang diperoleh oleh peneliti dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan (Zed, 2004).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka. Dimana data dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan sehingga mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Data-data tersebut akan dianalisis dan dibahas di dalam sub-sub bab dalam rangka mendapatkan kesimpulan untuk rumusan masalah yang ada. Data yang di dapat baik dari buku, jurnal dan literatur lain yang berhubungan.

Selain kajian pustaka, metode pengumpulan data juga dilakukan dengan pencarian data di internet. Baik berupa jurnal atau bahan referensi lainnya yang terdapat di internet dan terkait dengan rumusan masalah yang ingin diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Teori dengan *Green Accounting*

Menurut Fauzi & Chandra (2016), legitimasi adalah salah satu hal yang sangat strategis bagi upaya pengembangan perusahaan dimasa depan, adanya legitimasi dari masyarakat akan sangat membantu keberlangsungan (*going concern*) perusahaan untuk jangka waktu yang sangat lama. Teori legitimasi menekankan pada pentingnya suatu perusahaan harus memiliki keberpihakan pada *society*, perusahaan harus berusaha beroperasi sesuai dengan harapan masyarakat sehingga tidak timbul konflik yang bisa mengganggu perusahaan. Dalam kaitan dengan akuntansi lingkungan atau *Green Accounting* ini upaya perusahaan untuk melaporkan kinerja lingkungan dan sosial masyarakatnya secara transparan dan akuntabel diharapkan akan mendorong adanya kesesuaian keinginan antara perusahaan dengan masyarakat sehingga perusahaan bisa mendapatkan legitimasi dari masyarakat untuk menjaga keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

Berikut ini beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa penerapan *Green Accounting* pada perusahaan dalam mendapatkan legitimasi dari masyarakat akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup perusahaan dan citra perusahaan sendiri.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gray, Kouhy, & Lavers (1995) bahwa teori legitimasi juga memiliki beberapa wawasan untuk ditawarkan mengenai tren dalam lingkungan, kesehatan dan keselamatan, energi dan pengungkapan pelanggan. Semakin banyak perusahaan diminta untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan terkait dengan lingkungan. *Corporate social reporting* (CSR) tampaknya menjadi salah satu mekanisme yang digunakan organisasi untuk memenuhi persyaratan tadi. Perusahaan kemudian mengungkapkan hal tersebut kepada masyarakat, dimana pengungkapan ini kemudian membantu menambah citra perusahaan yang kompeten dan peduli, karena melakukan tanggung jawabnya di bidang ini (lingkungan) dengan serius.

Hasil penelitian Deegan & Rankin (1996) adalah perusahaan-perusahaan percaya bahwa perusahaan yang secara sukarela menerapkan dalam laporan keuangannya terkait lingkungan, mendapatkan tanggapan yang lebih positif daripada perusahaan yang “dituntut” untuk mengungkapkan terkait lingkungan. Tampaknya perusahaan percaya ada kebutuhan untuk melegitimasi keberadaan perusahaan mereka, upaya legitimasi dilakukan dengan pengungkapan terkait lingkungan yang baik.

Begitu juga hasil penelitian dari Deegan & Gordon (2012) bahwa peningkatan umum dalam pengungkapan lingkungan terjadi selama periode 1988 hingga 1991. Peningkatan ini berhubungan positif dengan peningkatan keanggotaan kelompok lingkungan. Ada korelasi positif antara sensitivitas lingkungan dan tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan. Untuk perusahaan dalam industri yang sensitif terhadap lingkungan, ada korelasi positif antara pengungkapan lingkungan dan ukuran perusahaan.

Hasil yang sama dari penelitian Branco & Rodrigues (2006) adalah Bank dengan visibilitas yang lebih tinggi di antara konsumen tampaknya menunjukkan perhatian yang lebih besar untuk meningkatkan citra perusahaan melalui pengungkapan informasi tanggung jawab sosial. Hasilnya menunjukkan bahwa teori legitimasi dapat menjadi penjelasan pengungkapan tanggung jawab sosial oleh bank-bank Portugis.

Hasil yang sama juga dari penelitian Ramdhony (2015) yaitu teori legitimasi memprediksi bahwa bank-bank yang ada di benak publik melalui visibilitas yang lebih besar, memiliki justifikasi yang lebih baik untuk mengungkapkan lebih banyak CSR. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bank dengan jumlah ATM lebih banyak mengungkapkan informasi CSR yang lebih besar dan bank yang terdaftar melaporkan informasi CSR lebih banyak daripada bank yang tidak terdaftar. Oleh karena itu kami menyimpulkan bahwa teori legitimasi adalah penjelasan yang tepat untuk tingkat pengungkapan CSR di sektor perbankan Mauritius.

Dari semua hasil penelitian di atas dapat dikatakan bahwa perusahaan yang secara “sukarela” mengungkapkan dalam laporan keuangan perusahaannya terkait dengan lingkungan, mendapatkan respon yang lebih positif daripada yang “dituntut” untuk mengungkapkannya. Dikarenakan terkait dengan teori legitimasi, bahwa ada harapan dari masyarakat luas terhadap perusahaan terkait lingkungan, yang tertuang dalam “kontrak sosial” antara perusahaan dan masyarakat.

Seperti yang dikatakan oleh Carroll (1991) terkait dengan *Stakeholder Theory* mengatakan bahwa badan-badan pemerintahan saat ini menetapkan bahwa kebijakan publik nasional sekarang secara resmi mengakui lingkungan, karyawan, dan konsumen sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) bisnis yang signifikan dan sah. Sejak saat itu, eksekutif perusahaan harus bergulat dengan bagaimana mereka menyeimbangkan komitmen mereka kepada pemilik perusahaan dengan kewajiban mereka kepada sekelompok pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lebih luas yang mengklaim hak hukum dan etika. Dikarenakan lingkungan sudah menjadi salah satu *stakeholder* bagi perusahaan, maka manajemen akan melakukan tanggung jawabnya terhadap lingkungan.

Penelitian Wong & Millington (2014) bertujuan untuk menyelidiki jaminan pengungkapan sosial perusahaan (CSD) dari perspektif pemangku kepentingan dalam studi yang mencakup preferensi pemangku

kepentingan dan permintaan pendorong jaminan CSD. Adapun hasilnya adalah secara keseluruhan, komentar pemangku kepentingan menyarankan penekanan pada pentingnya spesialis penjamin lingkungan dan peran dari kepercayaan. Permintaan atas jaminan secara positif berhubungan dengan penilaian pemangku kepentingan atas nilai CSD.

Menurut Darwis Said (2020) dalam bukunya yang berjudul “Kearifan Lingkungan dalam Praktik Akuntansi” berpendapat bahwa untuk lebih mengoptimalkan tanggung jawab perusahaan dan pencapaian sasaran adalah perlunya untuk memperluas *stockholders* ke *stakeholders*, dan memperluas *stakeholders* dari paradigma antroposentrisme ke paradigma holistik-ekologis dan spiritual. Dalam paradigma yang disebutkan terakhir, alam semestinya menjadi stakeholder dan sebagai stakeholder utama adalah Tuhan, sebagai pencipta manusia dan alam.

Konsep *stakeholders* yang berbasis pada paradigma holistik-ekologis dan spiritual dengan sendirinya memiliki konsekuensi logis terhadap : tanggung jawab perusahaan (*corporate social responsibility* – CSR), konsep kinerja perusahaan dan bentuk laporan keuangan (akuntansi sosial dan lingkungan). Hasil penelitiannya memformulasikan tiga dimensi *stakeholders* utama perusahaan, khususnya perusahaan yang mengelola sumber daya alam secara langsung, yakni : Tuhan, alam, dan manusia (Said, 2020).

Peraturan Terkait *Green Accounting* dan Implementasinya

Untuk beberapa negara, peraturan terkait dengan *Green Accounting* ini, dapat dilihat sebagai berikut:

India

Sesuai Konstitusi India, Pasal 51A Prinsip-Prinsip Arahan “Adalah kewajiban setiap warga negara India, untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan alami termasuk hutan, danau, sungai dan satwa liar dan untuk memiliki belas kasihan bagi makhluk hidup. Ketentuan konstitusi didukung oleh sejumlah undang-undang - tindakan, peraturan, dan pemberitahuan seperti *Factories Act* 1948; (Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran) *Act* 1974; *Forest Act* (Konservasi) 1980; *Air Act* (Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran) 1981; Peraturan Limbah Biomedis Air (Manajemen dan Penanganan) 1998; Peraturan Limbah Padat Kota (Manajemen dan Penanganan), 2000; Zat Perusak Zat (Peraturan dan Kontrol) Aturan 2000; Peraturan Polusi Kebisingan (Regulasi dan Kontrol) (Amandemen) 2002; *Biological Diversity Act* 2002. Departemen Lingkungan Hidup didirikan di India pada tahun 1980 untuk memastikan lingkungan yang sehat bagi negara. Ini kemudian menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan (MOEF) pada tahun 1985. EPA (Undang-Undang Perlindungan Lingkungan), 1986 mulai berlaku segera setelah Tragedi Gas Bhopal dan dianggap sebagai undang-undang payung karena mengisi banyak celah dalam undang-undang yang ada (Kumar, Pranitha, & Kumar);

Denmark

Pada tahun 1996, Social and Environmental Accounting melaporkan amandemen terhadap tindakan perlindungan lingkungan Denmark yang mengharuskan perusahaan Denmark tertentu (pada tahun 1998 mencakup sekitar 1.200 perusahaan) untuk mempublikasikan informasi lingkungan dalam bentuk akun hijau. Informasi yang diberikan oleh perusahaan (walaupun tidak secara khusus ditentukan) harus diserahkan kepada otoritas lokal dan pemerintah dan ditujukan untuk memberikan warga negara dengan informasi tentang kegiatan dan dampak dari perusahaan Denmark. Selama tahun 1999 undang-undang ini telah dievaluasi oleh pemerintah Denmark dan mereka menerbitkan kesimpulan mereka pada Agustus 1999. (Bebbington & Thy, 1999);

Belanda

Environmental Management Act Tahun 1999, dimana pada tahun itu sekitar 260 perusahaan terpaksa mengungkapkan laporan lingkungan. Selain itu, 40 perusahaan secara sukarela memberikan laporan. (Jui-Che Tu & Huang, 2015);

Amerika Serikat

Beberapa peristiwa digabungkan untuk menciptakan iklim kepedulian ekologis yang mengarah pada tahun 1969 dengan penerapan *National Environmental Policy Act* (NEPA), yang membahas perlunya kebijakan lingkungan nasional. Kemudian pada tahun 1970, Presiden Nixon membentuk *Environmental Protection Agency* (EPA), sebuah badan independen yang ditugaskan untuk misi melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Sebelum pembentukannya, pemerintah federal tidak memiliki satu administrator pun untuk mengatasi masalah polusi. Pada tahun 1971, *Environmental Protection Agency* memulai proses *delisting* DDT, yang secara efektif melarang penggunaannya di Amerika Serikat. (Jui-Che Tu & Huang, 2015);

Jepang

Selama paruh pertama tahun 1990-an ketika kata "*environmental accounting*" tidak digunakan secara umum, hanya segelintir perusahaan yang mengukur biaya lingkungan. Namun, menurut survei MOE (2001a), dari perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas yang menjawab bahwa mereka mengungkapkan informasi

lingkungan, proporsi yang mengungkapkan informasi akuntansi lingkungan menunjukkan tren kenaikan tajam dari 10,4 persen (1998) menjadi 20,9 persen (1999) hingga 27,0 persen (2000). Mengenai pertanyaan tentang pengenalan akuntansi lingkungan, 17,3 persen menjawab bahwa mereka telah memperkenalkannya, sementara 34,2 persen menjawab bahwa mereka sedang mempertimbangkan penerapannya. Tren ini jelas dipengaruhi oleh pedoman akuntansi lingkungan yang diterbitkan oleh *Environmental Agency* (sekarang *Ministry of Environment* : MOE) pada Mei 2000. (Kokubu & Nashioka, 2016);

Indonesia

Dapat dirangkum peraturan terkait *Green Accounting* di Indonesia sebagai berikut: a).Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; b).Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal; c).Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; d).Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik; e).Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 32 (Akuntansi Kehutanan) dan No. 33 (Akuntansi Pertambangan Umum); dan f).Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penetapan Peringkat Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum (Kusumaningtyas, 2013). Selain peraturan yang telah disebutkan, terdapat juga peraturan lain seperti yang dikutip sebagai berikut dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) RI No 47 tahun 2012 yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan (TJSL) pada Perseroan Terbatas (PT) tentu diharapkan menjadi tonggak dimulainya pelaksanaan akuntansi lingkungan (*Green Accounting*) yang lebih luas bagi perusahaan yang bisnisnya di bidang atau terkait dengan sumber daya alam di Indonesia. Berbeda dengan PP sejenis yang pernah dikeluarkan sebelumnya, PP ini mengatur secara tegas tentang kewajiban perusahaan untuk melakukan penyusunan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran terkait dengan TJSL (pasal 4) serta melakukan pengungkapan pelaksanaan TJSL perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan di depan Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahunnya (pasal 6). Ada keinginan yang besar dari pemerintah untuk memaksa perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia khususnya yang bisnisnya terkait dengan sumber daya alam untuk lebih peduli pada lingkungannya sebagaimana yang terlihat dari semangat yang dimunculkan pada beberapa pasal dalam PP ini (Fauzi & Chandra, 2016).

Penelitian Kinerja Lingkungan Terkait *Green Accounting*

Berikut ini dikompilasi beberapa hasil penelitian terkait implementasi *Green Accounting* dan hubungannya dengan kinerja perusahaan (baik penelitian di Indonesia maupun di beberapa negara lainnya) :

Indonesia

Nuryanti, Nurlily, & Rosdiana (2015) mengatakan dalam penelitiannya bahwa para pengusaha di bidang industri tekstil tidak memikirkan cara pengolahan limbah yang dihasilkan secara serius. Sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan akibat industri tekstil adalah berupa pencemaran debu yang dihasilkan penggunaan mesin berkecepatan tinggi dan limbah cair yang berasal dari tumpahan dan air cucian tempat pencelupan larutan kanji dan proses pewarnaan. Berbagai kasus kerusakan lingkungan yang terjadi menjadi bukti awal bahwa kinerja lingkungan industri tekstil di Indonesia masih buruk. Untuk menanggulangi banyaknya kerusakan lingkungan hidup, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah melakukan pemeringkatan kinerja lingkungan perusahaan melalui suatu program yang dinamakan *Program for Pollution Control, Evaluation and Rating* atau biasa disebut PROPER. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akuntansi lingkungan pada perusahaan tekstil di wilayah Bandung, kinerja lingkungan pada perusahaan tekstil di wilayah Bandung, dan pengaruh akuntansi lingkungan terhadap kinerja lingkungan pada perusahaan tekstil di wilayah Bandung. Adapun metode penelitian yang digunakan, adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan statistik regresi sederhana. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, berkaitan dengan pengaruh Akuntansi Lingkungan terhadap Kinerja Lingkungan pada perusahaan tekstil di wilayah Bandung yang mengikuti Program PROPER tahun 2012 – 2013, dapat disimpulkan bahwa : Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat dikatakan Akuntansi Lingkungan mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Lingkungan pada perusahaan tekstil di wilayah Bandung yang mengikuti PROPER. Akuntansi Lingkungan memberikan pengaruh sebesar 97,4% terhadap Kinerja Lingkungan pada perusahaan tekstil di wilayah Bandung yang mengikuti PROPER. Pengaruh sebesar 97,4% tergolong pengaruh yang besar dan memiliki makna yang signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh uji yang bermakna signifikan.

Fenomena pemanasan global dan kerusakan lingkungan telah mendorong perusahaan untuk lebih peduli terhadap aspek lingkungan dan menunjukkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Dalam hal ini, implementasi akuntansi lingkungan dapat menjadi alat bantu manajemen untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan selanjutnya mempermudah pengungkapan informasi lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban lingkungan kepada stakeholders perusahaan. Penelitian ini menguji pengaruh implementasi akuntansi lingkungan

terhadap kinerja lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan. Populasi target adalah 33 perusahaan pertambangan umum yang mengikuti PROPER periode 2008-2009 dengan jumlah sampel 30, yaitu sejumlah perusahaan yang merespon kuesioner. Responden adalah kepala bagian akuntansi perusahaan. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner sedangkan data sekunder diperoleh melalui publikasi di internet maupun diperoleh langsung dari perusahaan. Metode analisis jalur dengan bantuan software Lisrel 8.70 digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) implementasi akuntansi lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja lingkungan, dan (2) implementasi akuntansi lingkungan dan kinerja lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan informasi lingkungan, baik secara simultan maupun parsial. Hasil ini menimbulkan implikasi terhadap perlunya praktik akuntansi perusahaan diperluas dengan memasukkan aspek lingkungan. Dengan demikian, akuntansi dapat berkontribusi dalam pertanggungjawaban lingkungan perusahaan. (Burhany, 2011);

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Zulhaimi (2015) adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi hijau dan untuk menemukan dampak penerapan akuntansi hijau terhadap pertumbuhan pendapatan dan harga saham di Industri Indonesia. Kegiatan industri seringkali memberi dampak buruk bagi lingkungan sekitar seperti kerusakan alam dan perubahan budaya, sosial dan ekonomi. Green accounting adalah perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mengurangi dampak. Penerapan akuntansi hijau dapat memberikan citra yang baik bagi perusahaan namun penelitian pendahuluan menemukan tidak banyak perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dan uji yang berbeda atau uji-t berpasangan akan digunakan untuk pengujian statistik, untuk menguji asumsi penelitian. Variabel penelitian ini adalah Green accounting, Earning per Shares dan Pertumbuhan Harga Saham. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi untuk pengembangan teori akuntansi hijau dan peningkatan penerapan akuntansi hijau terutama di Industri Indonesia di era komunitas Ekonomi Asia. Dari hasil pengujian terbukti bahwa terdapat kenaikan *earning* dan harga saham setelah penerapan *Green Accounting*, hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan para ahli. Walaupun hasil pengujian t-test menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara data sebelum dan sesudah penerapan *Green Accounting*, hal ini disebabkan terbatasnya jumlah sampel yang memenuhi kriteria penilaian yaitu hanya 6 sampel. Dari kesimpulan tersebut penulis dapat memberi saran kepada pelaku industri agar tidak ragu menerapkan *Green Accounting* karena terbukti memberikan manfaat bagi perusahaan.;

Amerika Serikat

Penelitian yang dilakukan oleh Russo & Fouts (1997) menggambarkan pada pandangan berbasis sumber daya perusahaan, mereka berpendapat bahwa kinerja lingkungan dan kinerja ekonomi terkait positif dan bahwa pertumbuhan industri memoderasi hubungan tersebut, dengan pengembalian terhadap kinerja lingkungan yang lebih tinggi pada industri dengan pertumbuhan tinggi. Mereka menguji hipotesis ini dengan analisis 243 perusahaan selama dua tahun, menggunakan peringkat lingkungan yang dikembangkan secara independen. Hasil menunjukkan bahwa "ada timbal balik dengan menjadi hijau" dan bahwa hubungan ini menguat dengan pertumbuhan industri. Kami menyimpulkan dengan menyoroti implikasi akademik dan manajerial studi ini, membuat referensi khusus untuk masalah sosial dalam literatur manajemen;

Penelitian yang dilakukan oleh Burnet & Hansen (2008) ini, menyelidiki hubungan antara kinerja lingkungan dan efisiensi produktif di industri utilitas listrik Amerika Serikat sebelum dan sesudah Amandemen Undang-Undang Udara Bersih 1990. Menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA), pemeriksaan *cross-sectional* menunjukkan pabrik berpolusi lebih rendah lebih efisien daripada pabrik berpolusi tinggi. Analisis longitudinal menunjukkan tanaman secara bersamaan dapat mengurangi polusi dan meningkatkan efisiensi relatif. Secara kolektif, hasil ini adalah bukti bahwa manajemen lingkungan yang proaktif dapat mengurangi biaya lingkungan dan dengan demikian, memberikan dukungan untuk mengadopsi sistem manajemen biaya lingkungan. Penelitian ini menambah bukti kolektif lebih lanjut tentang hubungan positif antara kinerja lingkungan dan kinerja ekonomi. Selain itu, ada beberapa alasan untuk berpendapat bahwa ukuran degradasi lingkungan yang sangat penting mungkin merupakan proksi yang baik untuk kinerja lingkungan industri. Meskipun demikian, mengembangkan ukuran kinerja lingkungan yang lebih komprehensif akan menjadi kontribusi yang signifikan, sesuatu yang mungkin akan dihasilkan penelitian di masa depan.

Penelitian ini (Guidry & Patten, 2010) menggunakan sampel 37 perusahaan publik yang berbasis di Amerika Serikat dengan siaran pers tertanggal, yang mengumumkan pertama kali dikeluarkannya laporan keberlanjutan mandiri selama Tujuan dari penelitian mereka adalah untuk menguji efek pasar dari rilis pertama kali dari laporan keberlanjutan dalam upaya untuk menentukan apakah investor memberikan nilai pada penerbitan laporan. Secara keseluruhan, hasil mereka menunjukkan, rata-rata, tidak ada reaksi pasar yang signifikan. Namun, temuan mereka juga menunjukkan bahwa kualitas laporan dalam hal luasnya indikator sosial dan lingkungan yang dilaporkan, secara signifikan mempengaruhi reaksi itu. Perusahaan yang mengeluarkan laporan berkualitas tinggi menunjukkan reaksi pasar yang jauh lebih positif daripada perusahaan yang mengeluarkan laporan kualitas lebih rendah. Temuan mereka juga menunjukkan bahwa kualitas laporan dalam hal luasnya indikator sosial dan lingkungan yang dilaporkan, secara signifikan mempengaruhi reaksi itu.

Perusahaan yang mengeluarkan laporan berkualitas tinggi menunjukkan reaksi pasar yang jauh lebih positif daripada perusahaan yang mengeluarkan laporan kualitas lebih rendah;

Denmark

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bebbington & Thy (1999) menggunakan prosedur penilaian sebagai berikut : a).Review dari 550 akun hijau (500 dari yang diajukan pada tahun 1998, 50 dari yang diajukan pada tahun 1997); b).Wawancara dengan manajer yang bertanggung jawab atas akun hijau di > 500 perusahaan (mewakili 60% dari manajer yang bertanggung jawab untuk mengirimkan akun hijau); c).Wawancara dengan 320 orang dengan latar belakang atau diduga memiliki minat dalam akun hijau; d).Tanggapan kuesioner dari semua negara dan sebagian besar kota memiliki tanggung jawab pengawasan untuk menerima akun hijau; e).Wawancara dengan anggota Badan Perlindungan Lingkungan, Perdagangan dan Perusahaan Inspektorat Agensi dan Tenaga Kerja; f).Wawancara kelompok dan individu dengan perusahaan dan spesialis terpilih di daerah tersebut; g).Wawancara dengan 500 tetangga di daerah-daerah dengan perusahaan-perusahaan yang berpolusi; dan h).Wawancara dengan 1.900 konsumen (sebagai bagian dari survei acak). Hasil penelitiannya adalah evaluasi di Denmark terkait wajibnya pelaporan lingkungan tampaknya berisi hasil positif. Dimana setelah peninjauan kembali hukum Denmark menunjukkan bentuk *Green Accounting* ini memiliki manfaat yang signifikan bagi perusahaan;

Jepang

Hasil penelitian Kokubu & Nashioka (2016) adalah Menurut "A Survey of Environmentally Corporate Behavior", proporsi perusahaan terdaftar yang disurvei yang mengungkapkan informasi lingkungan menunjukkan tren peningkatan dari 35,7 persen (1998) menjadi 40,9 persen (1999) ke 51,0 persen (2000). Di luar perusahaan-perusahaan ini, proporsi perusahaan yang menerbitkan laporan lingkungan juga meningkat dari 30,9 persen (1998) menjadi 37,3 persen (1999) menjadi 45,9 persen (2000). Tren semacam ini kemungkinan akan semakin meningkat, dilihat dari publikasi "*Environmental Reports Guidelines (Fiscal 2000)*" oleh Ministry of the Environment (MOE) pada bulan Februari 2001 dan "*Environmental Reporting Guideline for Stakeholders*" oleh Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) pada Juni 2001. Jadi, jumlah perusahaan yang mengungkapkan informasi akuntansi lingkungan dalam laporan lingkungan mereka juga meningkat. Peningkatan ini dikarenakan perusahaan merasakan dampak positif bagi perusahaan atas kinerja lingkungannya terkait *Green Accounting*. Ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang menerapkan akuntansi lingkungan yang maju (berdasarkan beberapa jenis standar) dengan yang tidak. Ada juga perbedaan signifikan menurut sektor industri di antara perusahaan yang mengungkapkan informasi akuntansi lingkungan dalam laporan lingkungannya. Biaya lingkungan memiliki korelasi positif yang signifikan dengan penjualan, total aset, dan laba operasi perusahaan. Ada juga korelasi positif yang signifikan antara biaya lingkungan dan dampak ekonomi (efek substansial). Studi ini telah menunjukkan bahwa sementara pedoman MOE memiliki pengaruh yang kuat pada praktik akuntansi lingkungan di perusahaan-perusahaan Jepang, perbedaan menurut ukuran perusahaan dan sektor industri juga muncul. Pedoman MOE kemungkinan akan menjadi lebih banyak digunakan, tetapi pada saat yang sama ada beberapa perusahaan yang mencoba untuk memperluas konten akuntansi lingkungan mereka di luar pedoman. Akuntansi lingkungan di perusahaan-perusahaan Jepang menunjukkan fitur-fitur yang rumit karena standardisasi sedang berkembang di tengah keanekaragaman.

Jordan dan UAE (*United Arab Emirates*)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jahamani (2003) bahwa negara-negara maju telah mencapai banyak kemajuan dalam bidang akuntansi lingkungan. Negara-negara berkembang seperti Yordania dan UAE masih dalam tahap awal pada saat itu tetapi banyak para pengambil keputusan perusahaan di kedua negara sadar akan pentingnya perlindungan lingkungan. Faktor-faktor utama yang membuat para pengambil keputusan perusahaan sadar akan pentingnya perlindungan lingkungan adalah karena adanya peraturan berpayung hukum terkait lingkungan, filosofi *top management*, masukan dari masyarakat terkait perlindungan lingkungan, dan adanya keselarasan dengan perusahaan induk tentang pengungkapan terkait perlindungan lingkungan. Para perusahaan pun melaporkan kinerja terkait perlindungan lingkungan.

Malaysia

Studi ini menyelidiki faktor dan hambatan yang mempengaruhi praktik akuntansi manajemen lingkungan (selanjutnya dikenal sebagai EMA). Teori institusional digunakan dan data dikumpulkan melalui kuesioner. Studi ini berfokus pada usaha kecil menengah (selanjutnya dikenal sebagai UKM) khususnya, perusahaan manufaktur kecil menengah Malaysia. Pemerintah Malaysia, terutama departemen yang terlibat dalam pembuatan UKM, dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan praktik *Environmental Management Accounting* (EMA) melalui penerbitan pedoman dan pelatihan yang tepat. Sampai batas tertentu, otoritas pajak harus mengeluarkan insentif pajak untuk merangsang minat kalangan UKM manufaktur Malaysia untuk menerapkan EMA karena temuan tersebut menunjukkan bahwa kendala keuangan adalah penghalang paling

penting yang mencegah mereka menerapkan EMA. Badan profesional akuntansi juga harus terlibat dalam mempromosikan EMA dengan memberikan kerangka kerja yang lebih baik untuk praktik EMA. Sebagai kesimpulan, upaya mengintegrasikan masalah lingkungan ke dalam sistem dan praktik akuntansi yang ada membutuhkan mekanisme pembelajaran organisasi, tanggung jawab perusahaan yang lebih besar, dan bimbingan yang tepat tentang EMA. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan lingkungan dan mempraktikkan EMA fisik. Studi ini berpendapat bahwa paksaan adalah faktor dominan untuk mempraktikkan EMA dan oleh karena itu, hambatan untuk pengembangan EMA harus diselesaikan oleh pemerintah Malaysia dan pihak berwenang lainnya. (Jamil, Mohamed, Muhammad, & Ali, 2015).

PENUTUP

Green Accounting menjadi jawaban atas “aturan main” yang diterapkan oleh pemerintah, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain. Penerapan *Green Accounting* dalam sistem akuntansi perusahaan sepertinya menjadi suatu keharusan pada saat ini. Walaupun pada awalnya merupakan “keterpaksaan” yang harus dilakukan oleh perusahaan dikarenakan adanya “aturan main” dari Pemerintah yang ada.

Walaupun nama yang digunakan untuk akuntansi yang mengungkapkan terkait lingkungan ada bermacam, dari *Green Accounting*, *Environmental Accounting* dan lainnya (tergantung nama yang digunakan oleh suatu negara), tetapi tetap saja tujuannya adalah sama, yaitu menjaga “umur hidup” alam (keberlanjutan alam) agar dapat juga dimanfaatkan oleh generasi-generasi berikutnya. Jelas bahwa konteks dimanfaatkan di sini adalah dimanfaatkan seperlunya, tanpa ada eksploitasi dan melakukan “peremajaan kembali” atas sumber alam yang telah digunakan.

Berdasarkan penelitian dari berbagai negara, pada penelitian ini, ada beberapa yang dapat disimpulkan, yaitu : telah banyak Negara yang menerapkan *Green Accounting* dan menuangkannya ke dalam peraturan-peraturan pemerintahan terkait *Green Accounting* tersebut; mungkin untuk di Indonesia masih terasa sedikit sulit untuk menerapkan *Green Accounting* , namun untuk menuju ke sana, sangat memungkinkan dengan salah satu caranya adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terus berupaya dan memperbaharui pedoman terkait *Green Accounting*; dapat dikatakan perusahaan yang menerapkan *Green Accounting* dalam sistem akuntansi yang digunakannya, akan memberikan hasil yang positif terkait kinerja lingkungan perusahaan tersebut; pada masa kini, perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang positif, mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat.

Dari hasil kesimpulan di atas, pada saat ini, makin banyak perusahaan menerapkan *Green Accounting* di dalam sistem akuntansi perusahaannya, karena sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa penerapan akuntansi lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan perusahaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alexopoulos, I., Kounetas, K., & Tzelepis, D. (2012). Environmental Performance and Technical Efficiency, is There a Link? The Case of Greek Listed Firms. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 61(1), 6-23.
- Amri, N. F. (2015, September 4). *Teori Legitimasi*. Retrieved May 15, 2020, from Akuntansi Online Accounting Information: <https://www.e-akuntansi.com/teori-legitimasi/>
- Bebbington, J., & Thy, C. (1999). Compulsory environmental reporting in Denmark: An evaluation. 19(2).
- Branco, M., & Rodrigues, L. (2006). Communication of Corporate Social Responsibility by Portuguese Banks : A Legitimacy Theory Perspective. *Corporate Communications: An International Journal*, 11(3), 232-248.
- Burhany, I. (2011). Pengaruh Implementasi Akuntansi Lingkungan Terhadap Kinerja Lingkungan Dan Pengungkapan Informasi Lingkungan Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. 1.
- Burnet, R., & Hansen, D. (2008). Ecoefficiency: Defining a role for environmental cost management. *Accounting, Organizations and Society*, 33, 551-581.
- Carroll, A. (1991). The pyramid of Corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39-48.
- Deegan, C., & Gordon, B. (2012). A Study of the Environmental Disclosure Practices of Australian Corporations. *Accounting and Business Research*, 26(3), 187-199.
- Deegan, C., & Rankin, M. (1996). Do Australian Companies Report Environmental News Objectively? An Analysis of Environmental Disclosures by Firms Prosecuted Successfully by The Environmental Protection Authority. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 9(2), 50-67.
- Deegan, C., Rankin, M., & Tobin, J. (2002). An Examination of The Corporate Social and Environmental Disclosures of BHP from 1983 - 1997 A Test of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 312-343.

- Efriyanti, F., Genevine, S., & Riswan. (2012). Analisis Perbandingan Pengungkapan Dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Terhadap PT. Bank Negara Indonesia (Study Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia). *III*, 267 - 280.
- Fauzi, N., & Chandra, N. (2016). Green Accounting dan Efektifitas Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 pada Perusahaan di Indonesia.
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of The Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8(2), 47-77.
- Guidry, R., & Patten, D. (2010). Market Reactions To The First-Time Issuance Of Corporate Sustainability Reports. *1*(1), 33-50.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.
- Jahamani, Y. (2003). Green Accounting in Developing Countries: The Case of U.A.E. and Jordan. *Managerial Finance*, 29(8), 37-45.
- Jamil, C., Mohamed, R., Muhammad, F., & Ali, A. (2015). Environmental management accounting practices in small medium manufacturing firms. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 619-626.
- Jui-Che Tu, & Huang, H.-S. (2015). Analysis on the Relationship between Green Accounting and Green Design for Enterprises. *7*, 6264-6277.
- Kokubu, K., & Nashioka, E. (2016). Environmental Accounting Practices of Listed Companies in Japan. *18*, 321-342.
- Kumar, N., Pranitha, T., & Kumar, N. (n.d.). A Study on Green Accounting and Its Practices in India.
- Kusumaningtias, R. (2013). Green Accounting, Mengapa Dan Bagaimana? *Proceeding Seminar Nasional*.
- Lako, A. (2018). Akuntansi Hijau: Isu, Rerangka Konseptual dan Aplikasi.
- Lindblom, C. (1994). The Implications of Organizational Legitimacy for Corporate Social Performance and Disclosure. *paper presented at the Critical Perspectives on Accounting Conference*.
- Maama, H., & Appiah, K. O. (2019). Green Accounting Practices: Lesson From An Emerging Economy.
- Ningsih, W. F., & Rachmawati, R. (2017). Implementasi Green Accounting Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan. *Journal of Applied Business and Economics*, 4, 149-158.
- Nurhasanah. (2018). Kajian Green Accounting Pada RSUD Labuang Baji Kota Makassar.
- Nuryanti, T., Nurlaly, & Rosdiana, Y. (2015). Pengaruh Akuntansi Lingkungan Terhadap Kinerja Lingkungan (Pada Perusahaan Tektstil Wilayah Bandung). *Prosiding Penelitian SPeSIA*.
- Ramdhony, D. (2015). Corporate Social Reporting By Mauritian Banks. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 5(2), 56-73.
- Russo, M., & Fouts, P. (1997). A Resources based Perspective on Corporate environment Performance and Profitability. *40*, 534-559.
- Said, D. (2020). *Kearifan Lingkungan dalam Praktik Akuntansi*. Makassar: CV Tohar Media.
- Suratno, I. (2006). Pengaruh Environmental Performance Terhadap Environmental Disclosure Dan Economic Performance (Study Empiris Pada Perusahaan Manufactur Yang Terdaftar Di Bursaefek Jakarta Periode 2001-2004). *Jurnal Riset akuntansi indonesia*, 10(2).
- Wong , R., & Millington, A. (2014). Corporate social and environmental reporting: a user perspective. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 27(5), 863-887.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zulhaimi, H. (2015). Pengaruh Penerapan Green Accounting Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Peraih Penghargaan Industri Hijau Yang Listing Di Bei). *3*(1), 603-616.